

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR SUBSIDI DAN PENDIDIKAN: TIDAK ADA HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN KEMISKINAN

Wisda Zulaeha Suwardi¹, Nurhidayati Islamiah²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar
wisdasuwardi@yahoo.co.id, nurhidayati_islamiah@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Data dianalisis menggunakan teknik statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang subsidi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun hubungan ini tidak signifikan. Karena data yang dihasilkan tidak signifikan, sehingga oleh data tidak dapat dilanjutkan pada analisis regresi linear. Pendanaan pendidikan memiliki hubungan yang lemah dengan kemiskinan, pun hubungan ini tidak signifikan. Karena data yang dihasilkan tidak signifikan, sehingga oleh data tidak dapat dilanjutkan pada analisis regresi linear.

Kata kunci: *pengeluaran pemerintah, subsidi, dana pendidikan, kemiskinan*

PENDAHULUAN

Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta mempromosikan pertumbuhan inklusif adalah hal mendasar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target pertama SDG1 adalah untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Meskipun beberapa upaya dilakukan oleh organisasi internasional, negara, dan komunitas, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar di dunia. Saat ini, 10% dari populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan internasional yang ditentukan sebesar US\$1,90 per hari (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020).

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Di banyak belahan dunia, kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi jutaan orang setiap hari. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan peluang ekonomi yang adil sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan.

Kehadiran kemiskinan dalam keluarga membatasi juga perkembangan anak-anak melalui pembatasan anggaran sumber keluarga, yang diinvestasikan orang tua ke dalamnya (Banovcinova et al., 2014). Salah satu dampak paling buruk dari kemiskinan adalah kesenjangan, yang semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya (Amponsah et al., 2023; Khan et al., 2022; Ochi, 2023). Masyarakat miskin umumnya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, seperti pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, dan makanan bergizi. Hal ini sering kali menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan menimbulkan kemiskinan yang lebih besar (Syaekhu et al., 2023).

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang seringkali memerlukan intervensi pemerintah yang tepat. Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, karena alokasi dana yang bijaksana dapat membantu memberikan bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan menyeluruh. Program sosial seperti bantuan tunai, hibah pendidikan, layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, dan program pangan

adalah contoh cara pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, belanja pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Investasi pada infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan insentif penciptaan lapangan kerja dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga lebih banyak orang mempunyai peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya. salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengeluaran untuk subsidi.

Pengeluaran pemerintah pada sektor subsidi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subsidi adalah suatu bentuk dukungan finansial atau insentif lain yang diberikan pemerintah kepada individu atau sektor perekonomian tertentu. Subsidi ini seringkali digunakan untuk mengurangi biaya hidup pokok atau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga dapat secara efektif mengurangi kemiskinan (Gu Jiafeng, 2023). Dalam konteks kemiskinan, subsidi dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap barang dan jasa dasar. Misalnya, subsidi energi, transportasi atau pangan dapat membantu mengurangi beban biaya hidup bagi kelompok yang kurang beruntung secara finansial. Hal ini dapat memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, transportasi dan energi, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan erat dengan kemiskinan. Pendidikan yang baik adalah kunci memutus siklus kemiskinan karena dapat membuka pintu peluang ekonomi yang lebih baik. Individu yang dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal biasanya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dengan upah yang lebih tinggi, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam lingkungan kerja yang kompetitif.

Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki akses atau kesempatan memperoleh pendidikan yang baik seringkali terjebak dalam kemiskinan. Kesempatan kerja bagi mereka mungkin terbatas dan seringkali terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah dan tidak ada jaminan kerja. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat menghambat akses mereka terhadap informasi dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi kemiskinan, seperti layanan kesehatan yang berkualitas, pelatihan keterampilan atau bantuan keuangan.

Tingkat pendidikan juga berdampak pada generasi penerus. Orang tua yang kurang berpendidikan umumnya mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan pendidikan yang memadai kepada anaknya, baik karena keterbatasan sumber daya keuangan maupun kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan adalah penyebab dan konsekuensi dari kesenjangan yang lebih luas yang kita lihat di masyarakat baik dalam pendapatan, kesehatan atau kebahagiaan (Farquharson et al., 2022). Hal ini dapat menimbulkan siklus kemiskinan yang berlanjut dari generasi ke generasi.

Pendidikan adalah cara penting untuk mengurangi kejadian kemiskinan dan memblokir penularan antargenerasinya. Karena tingkat pendidikan mencerminkan modal manusia, tingkat pendidikan yang rendah adalah alasan yang signifikan mengapa seorang individu mungkin jatuh ke dalam kemiskinan, sementara meningkatkan tingkat pendidikan seseorang adalah cara yang ampuh untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan merupakan salah satu strategi terpenting dalam mengatasi kemiskinan. Program-program seperti beasiswa, dukungan finansial untuk pendidikan dan akses terhadap pendidikan berkualitas harus didorong dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat luas. Dengan

memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, kita dapat membantu memutus siklus kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi setiap orang untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Menurut informasi yang dirilis oleh World Bank, ada penurunan yang sangat besar dalam tingkat kemiskinan dari tahun 2002 hingga 2023, dengan persentase kemiskinan turun dari 61% menjadi 16%. Indonesia dapat dianggap telah berhasil mencapai tujuannya dalam memerangi kemiskinan ekstrem, karena angka kemiskinan tersebut mencapai 1,5% pada tahun 2022. Kemajuan Indonesia dalam pengentasan kemiskinan merupakan hasil kombinasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penerapan program perlindungan sosial yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil telah menciptakan lapangan kerja baru dan peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mengangkat banyak orang keluar dari kemiskinan. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, pemerintah telah mendorong investasi, meningkatkan produktivitas dan memperluas sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja yang layak.

Selain itu, program perlindungan sosial yang efektif juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program-program seperti bantuan tunai langsung, bantuan pendidikan, subsidi pangan dan jaring pengaman sosial lainnya telah membantu kelompok paling rentan keluar dari kemiskinan ekstrem. Hal ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, namun juga membantu menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Subsidi sering kali dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan atau kurang beruntung secara ekonomi, dengan memberikan bantuan keuangan atau mengurangi biaya suatu barang atau jasa yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk hibah, mereka secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang mungkin berada di ambang kemiskinan, sehingga membantu mereka mengatasi hambatan ekonomi yang mungkin menghambat kemajuan. Hasil penelitian Carolina (2022) menunjukkan bahwa, ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang disediakan oleh pemerintah kurang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya hasil penelitian Pratama & Utama (2019), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Pendidikan memainkan peranan penting dalam memerangi kemiskinan, yang dampaknya meluas dari tingkat individu hingga tingkat masyarakat secara keseluruhan. Melalui akses terhadap pendidikan berkualitas, individu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, seseorang biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan lebih stabil, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan finansial dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, pendidikan juga merupakan sarana penting untuk mengurangi kemiskinan generasi. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah dan mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas mempunyai peluang lebih besar untuk keluar dari siklus kemiskinan yang seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini karena pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan akademis, tetapi juga membantu memperkuat keterampilan sosial, emosional, dan kehidupan yang diperlukan untuk sukses dalam hidup. Hasil penelitian Misdawati (2018), menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasaran pengguna subsidi di

lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Penelitian akan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023. Data dianalisis menggunakan teknik statistik, seperti analisis regresi linier berganda, untuk memahami hubungan antara variabel independen (pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tingkat pendidikan) dan variabel dependen (tingkat kemiskinan) dengan menggunakan aplikasi SPSS, namun sebelum data diolah, terlebih dahulu di lognaturalkan sehingga data tidak bias, karena satuan data yang jauh berbeda, seperti triliun, miliar, dan juta. Tujuan analisis ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

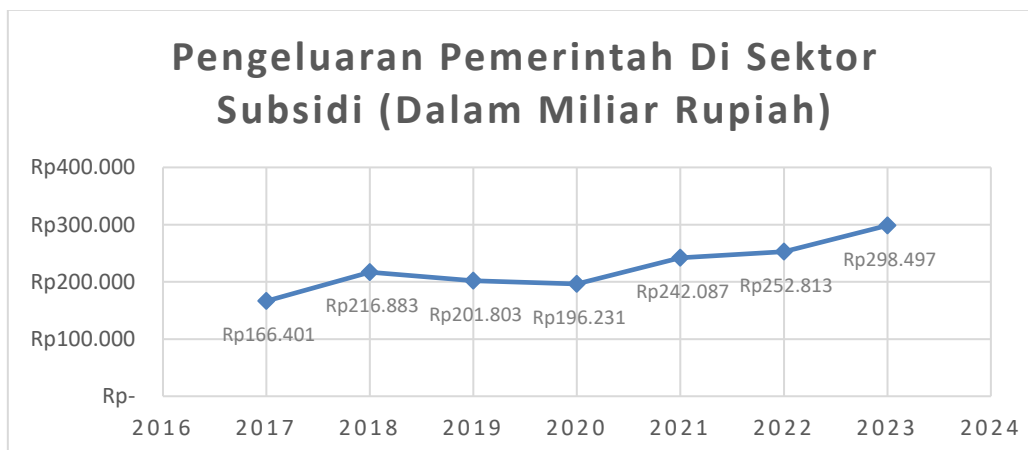
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data subsidi tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2017, besaran subsidi sebesar Rp166,401 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp242,087 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya beban anggaran pemerintah dalam hal subsidi pada periode tersebut.

Faktor makroekonomi dapat memainkan peranan penting dalam fluktuasi subsidi. Misalnya, kenaikan harga komoditas dapat menyebabkan biaya subsidi meningkat karena harga barang dan jasa yang disubsidi juga naik. Demikian pula, peningkatan permintaan terhadap layanan bersubsidi juga dapat menyebabkan peningkatan subsidi, karena pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi permintaan.

Kedua, periode tahun 2020 hingga 2021 merupakan periode dimana pemerintah menaruh perhatian besar dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini, belanja subsidi dapat meningkat karena pemerintah perlu memberikan bantuan tambahan kepada sektor-sektor yang terkena dampak pandemi, seperti sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Data yang diberikan menunjukkan bahwa belanja subsidi terus meningkat dari tahun ke tahun setelah tahun 2021. Pada tahun 2022, belanja subsidi sebesar Rp252,813 miliar, dan pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp298,497 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran terkait subsidi terus meningkat.



Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah di sektor Subsidi (dalam Miliar Rupiah)

Selanjutnya dana yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan juga merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan. Penilaian terhadap alokasi dana pendidikan juga harus dilakukan bersamaan dengan analisis subsidi, untuk memastikan sumber daya negara dialokasikan secara seimbang dan efektif sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Berikut disajikan bagan yang menggambarkan penggunaan dana pendidikan mulai 2017 hingga 2021:



Gambar 2: Penggunaan Dana Pendidikan (dalam triliun rupiah)

Alokasi dana pendidikan merupakan bagian penting dari anggaran suatu negara, yang menentukan prioritas dan komitmen terhadap pengembangan sistem pendidikan. Jika kita melihat data alokasi dana pendidikan Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2023, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, alokasi dana pendidikan sebesar 406,1 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

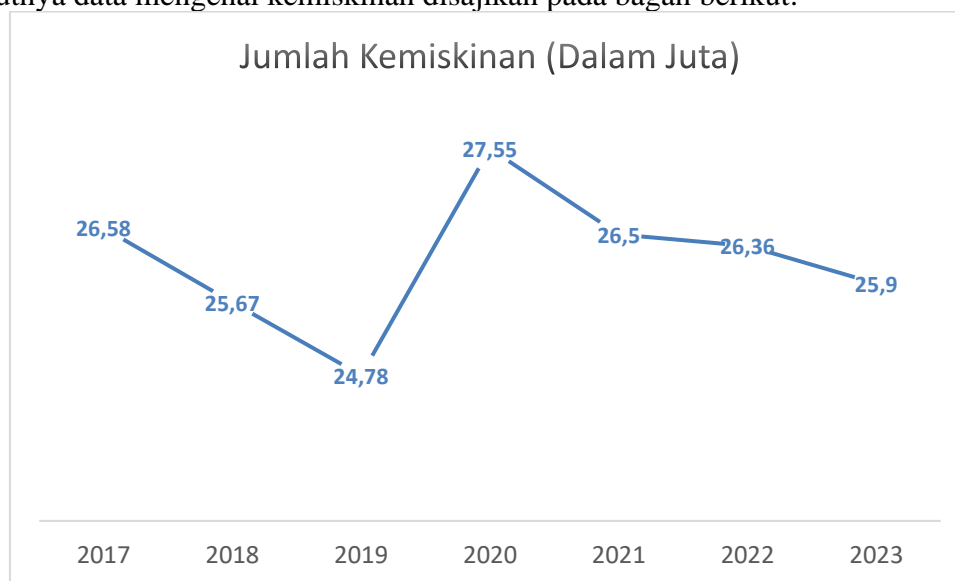
Tren peningkatan alokasi dana pendidikan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, alokasi pendanaan meningkat menjadi 431,7 triliun rupiah, menunjukkan peningkatan fokus pada sektor pendidikan. Pemerintah terus memprioritaskan pembangunan

pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.

Fokus pada pendidikan akan terus ditekankan pada tahun-tahun mendatang, dengan alokasi dana pendidikan mencapai 460,3 triliun rupiah pada tahun 2019, 473,7 triliun rupiah pada tahun 2020, dan 479,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan. akses terhadap pendidikan.

Puncak peningkatan alokasi dana pendidikan akan terjadi pada tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 547,9 triliun rupiah. Lonjakan signifikan ini mungkin disebabkan oleh pemahaman akan pentingnya investasi di bidang pendidikan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Tren positif ini akan berlanjut pada tahun 2023 dengan alokasi dana pendidikan mencapai 612,2 triliun rupiah.

Selanjutnya data mengenai kemiskinan disajikan pada bagan berikut:



Gambar 3: Data Kemiskinan 2017-2021 (dalam juta rupiah)

Pada tahun 2017, jumlah kemiskinan mencapai 26,58 juta orang. Namun upaya untuk mengatasi permasalahan ini terus dilakukan. Tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 25,67 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa langkah awal dalam mengurangi kemiskinan mulai menunjukkan hasil.

Namun tantangan selalu ada dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 24,78 juta jiwa. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika ekonomi dan sosial mempengaruhi kondisi sosial. Namun, tidak ada pertanyaan untuk menyerah. Pada tahun-tahun berikutnya, negara melanjutkan upayanya. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh cobaan, dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Angka kemiskinan yang meningkat menjadi 27,55 juta jiwa, menggambarkan besarnya dampak krisis kesehatan global ini.

Namun meski di tengah tantangan pada tahun 2021 terdapat tanda-tanda pemulihan: jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,5 juta. Tren ini akan terus berlanjut pada tahun 2022, dimana jumlah penduduk miskin akan sedikit berkurang lagi menjadi 26,36 juta jiwa. Hal ini menunjukkan kegigihan dan keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Pada tahun 2023 terjadi kemajuan lebih lanjut, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,9 juta.

Untuk mengetahui hubungan antar variabel, dilakukan uji korelasi product moment. Adapun hasil dari uji korelasi, disajikan pada Tabel 1:

Correlations

		Subsidi	Pendidikan	Kemiskinan
Subsidi	Pearson Correlation	1	.904**	-.219
	Sig. (2-tailed)		.005	.637
	N	7	7	7
Pendidikan	Pearson Correlation	.904**	1	-.035
	Sig. (2-tailed)	.005		.940
	N	7	7	7
Kemiskinan	Pearson Correlation	-.219	-.035	1
	Sig. (2-tailed)	.637	.940	
	N	7	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah Data oleh Penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dan kemiskinan adalah negatif, yakni -0,219 (hubungan cukup), artinya jika subsidi ditingkatkan, maka kemiskinan akan menurun. Namun hasil ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan, yakni lebih dari 5%. Selanjutnya pengeluaran di bidang pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan namun memiliki hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Karena hasil uji korelasi tidak menunjukkan hasil signifikan, olehnya itu tidak dapat dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh antarvariabel.

Hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat subsidi pemerintah, perkiraan tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan arah hubungan yang sejalan dengan harapan bahwa subsidi akan membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Namun, temuan bahwa hubungan ini tidak signifikan menunjukkan bahwa variabilitas tingkat kemiskinan tidak dapat dijelaskan secara substansial oleh variabilitas belanja pemerintah untuk subsidi.

Efektivitas subsidi dalam mengurangi kemiskinan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk desain program, mekanisme distribusi, dan kualitas pelaksanaan. Jika program subsidi tidak dirancang dengan baik atau tidak tepat sasaran, maka manfaatnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terbatas atau bahkan hilang sama sekali.

Terdapat risiko kebocoran dalam pelaksanaan program subsidi. Artinya, sebagian dana subsidi mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan malah digunakan untuk tujuan yang tidak terkait. Dalam kasus subsidi BBM, misalnya, ada risiko sebagian bantuan disalahgunakan atau ditujukan kepada masyarakat atau perusahaan yang sebenarnya tidak membutuhkan.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dan kemiskinan bersifat negatif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan lebih dari sekedar mengalokasikan anggaran untuk subsidi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi kemiskinan diperlukan, serta evaluasi yang cermat terhadap efektivitas kebijakan publik dalam mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Hosan et al. (2023), bahwa

kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, hubungan sosial, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian Bacon, et al. (2010), menunjukkan bahwa, pengurangan/penghapusan subsidi menyebabkan harga yang lebih tinggi yang berdampak negatif terhadap kemiskinan: rumah tangga miskin lebih mungkin terkena dampak reformasi subsidi karena mereka biasanya menghabiskan bagian yang relatif lebih tinggi dari anggaran rumah tangga mereka untuk pengeluaran mereka dan seringkali tidak mampu mengatasi harga yang lebih tinggi. Lebih lanjut, hasil penelitian Couharde & Mouhoud (2020) menunjukkan bahwa, menggunakan subsidi energi adalah untuk menangkal kemiskinan dan ketidakadilan dengan memastikan akses energi yang lebih besar melalui subsidi bahan bakar fosil. Banyak bukti mendukung fakta bahwa penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap menyebabkan penurunan awal dalam pertumbuhan dan lonjakan kemiskinan yang lebih tajam, sementara pengurangan bertahap memperlancar pertumbuhan dan efek kemiskinan ini, karena pertumbuhan harga bahan bakar yang lebih lambat (Rentschler & Bazilian, 2017; Siddig et al., 2014)

Hasil penelitian Zhang, et al. (2021) menunjukkan hal berbeda bahwa kebijakan subsidi untuk proyek pengentasan kemiskinan fotovoltaik di Cina membutuhkan reformasi yang mendesak karena proyek ini tidak hanya lebih bergantung pada subsidi tetapi juga tidak efisien dalam menggunakan subsidi. Salah satu permasalahan utama adalah ketergantungan yang berlebihan pada subsidi. Meskipun subsidi dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong adopsi energi terbarukan, ketergantungan yang terlalu besar dapat menciptakan ketergantungan yang tidak sehat pada bantuan pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dalam jangka panjang.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multi-dimensi, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, mengaitkan secara langsung pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dengan kemiskinan mungkin terlalu simplistik dan tidak mencerminkan gambaran yang lengkap dari dinamika kemiskinan dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dana pendidikan terhadap kemiskinan, namun pada taraf yang lemah. Alokasi dana pendidikan yang memadai merupakan kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Namun, alokasi dana pendidikan yang besar tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan secara signifikan. Faktor-faktor lain seperti pengelolaan dana yang efektif, distribusi yang adil dan penggunaan dana yang tepat dapat mempengaruhi dampak sebenarnya dari investasi pendidikan terhadap kemiskinan.

Dampak pembiayaan pendidikan terhadap kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, struktur ekonomi, dan kesenjangan pendapatan. Misalnya saja, walaupun setiap orang mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas, manfaat dari investasi di bidang pendidikan tersebut mungkin akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali jika tidak tersedia lapangan kerja atau jika struktur ekonomi tidak mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak.

Salah satu tema umum adalah evaluasi efek dari program kesejahteraan yang berbeda, seperti kredit pajak penghasilan yang diperoleh, program bantuan nutrisi tambahan, pendapatan keamanan tambahan, bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan. Ini termasuk juga analisis pengeluaran publik saat ini untuk manfaat sosial dan pengaruhnya terhadap kekurangan anak, dan pengeluaran publik untuk pendidikan dan efeknya terhadap kemiskinan di masa dewasa (Hofmarcher, 2021).

Pendidikan adalah dasar untuk pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan menyediakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pendidikan dan penentu lingkungan, ekonomi dan sosial lainnya tentang kemiskinan. (Liu Fengqin et al., 2021). Hasil ini bersesuaian juga dengan hasil penelitian Pal (2024) bahwa pendidikan dasar tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian Nadege & Ndjobo (2020) menunjukkan bahwa, pendidikan mengurangi kemiskinan orang yang hidup dekat dengan garis kemiskinan di Kamerun Sebaliknya ketika orang miskin jatuh jauh di bawah garis kemiskinan biaya yang terkait dengan proses perolehan pendidikan cenderung berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk rumah tangga di Kamerun

Pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Faktor-faktor lain seperti kesehatan, akses terhadap layanan publik dan kesetaraan gender juga dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, menghubungkan langsung pendanaan pendidikan dengan tingkat kemiskinan mungkin terlalu sederhana, dan perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang saling terkait dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pengeluaran pemerintah, khususnya dalam sektor subsidi, dan pendidikan dengan tingkat kemiskinan. Ditemukan bahwa ada hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan, di mana peningkatan subsidi dapat berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa variabilitas dalam pengeluaran pemerintah tidak secara substansial menjelaskan tingkat kemiskinan. penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang memperhitungkan berbagai faktor yang saling terkait. Sementara pengeluaran pemerintah dan alokasi dana pendidikan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut, perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan kompleksitas dalam dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan dan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam kebijakan publik untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106415>

Bacon, R., Bhattacharya, S., & Kojima, M. (2010). Expenditure of Low-Income Households on Energy: Evidence from Africa and Asia. In *Extractive Industries for Development Series #16* (Issue 16).

Banovcinova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The Impact of Poverty on the Family System Functioning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.291>

- Carolina, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.125>
- Couharde, C., & Mouhoud, S. (2020). Fossil Fuel Subsidies, Income Inequality, and Poverty: Evidence From Developing Countries. *Journal of Economic Surveys*, 34(5). <https://doi.org/10.1111/joes.12384>
- Farquharson, C., McNally, S., & Tahir, I. (2022). Education inequalities. *IFS Deaton Review of Inequalities*.
- Gu Jiafeng. (2023). Energy poverty and government subsidies in China. *Energy Policy*, 180, 113652. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113652>
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102124>
- Hosan, S., Sen, K. K., Rahman, Md. M., Karmaker, S. C., Chapman, A. J., & Saha, B. B. (2023). Evaluating the mediating role of energy subsidies on social well-being and energy poverty alleviation in Bangladesh. *Energy Research & Social Science*, 100, 103088. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103088>
- Khan, S., Yahong, W., & Zeeshan, A. (2022). Impact of poverty and income inequality on the ecological footprint in Asian developing economies: Assessment of Sustainable Development Goals. *Energy Reports*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.12.001>
- Liu Fengqin, Li Li, Zhang YunQian, Ngo, Q.-T., & Iqbal, W. (2021). RETRACTED ARTICLE: Role of education in poverty reduction: macroeconomic and social determinants form developing economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(44), 63163–63177. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15252-z>
- Misdawita, & Sari, A. A. P. (2018). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4.
- Nadege, N. O., & Ndjobo, P. M. N. G. A. (2020). Analysis of the impact of education on poverty in cameroon: an application of the Nested Logit Model. *Global Journal of Management and Business Research*, 20(B6), 31–38.
- Ochi, A. (2023). Inequality and the impact of growth on poverty in sub-Saharan Africa: A GMM estimator in a dynamic panel threshold model. *Regional Science Policy and Practice*, 15(6). <https://doi.org/10.1111/rsp3.12707>

- Pal, S. (2024). Do economic globalization and the level of education impede poverty levels? A non-linear ARDL approach. *The Journal of Economic Inequality*.
<https://doi.org/10.1007/s10888-023-09608-3>
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Rentschler, J., & Bazilian, M. (2017). Reforming fossil fuel subsidies: drivers, barriers and the state of progress. *Climate Policy*, 17(7).
<https://doi.org/10.1080/14693062.2016.1169393>
- Siddig, K., Aguiar, A., Grethe, H., Minor, P., & Walmsley, T. (2014). Impacts of removing fuel import subsidies in Nigeria on poverty. *Energy Policy*, 69.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.02.006>
- Syaekhu, A., Handayani, S., & Arhas, S. H. (2023). Efforts to Prevent Malnutrition in Marginal Communities in Makassar City. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(10), 8784–8790.
- Zhang, H., Xu, Z., Zhou, Y., Zhang, R., & Cao, J. (2021). Optimal subsidy reduction strategies for photovoltaic poverty alleviation in China: A cost-benefit analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 166, 105352.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105352>